

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG DASAR/KONSTITUSI

RI, Sekretariat Jenderal MPR. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.” Jdih.Bapeten.Go.Id, 1945, 1–21.

KITAB UNDANG-UNDANG

“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” 2023.

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.” Undang-undang No.13 Tahun 2003 4 (2003): 147–73.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” JDIH BPK 44, no. 8 (2011): 287.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2011.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Kementerian ESDM, 2009.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” 2000, 25.

PUTUSAN PENGADILAN (YURISPRUDENSI)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Nomor 5900 K/Pid.Sus/2025.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025.

Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008,” 2008. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.

BUKU

Arief, Barda Nawawi. “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.” PT Citra Aditya Bakti, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. “Konstitusi dan konstitusionalisme indonesia.” Pengertian Konstitusi, 2020, 2009–15.

Dewata, Mukti Fajar Nur Achmad, Yulianto. Dualisme penelitian hukum : normatif dan empiris. Pustaka Pelajar. Pustaka Pelajar, 2010.

Djazuli, A. Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari’ah. Kencana, 2003.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. “Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.” Depok : Prenandamedia Goup, 2018.

Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayu Media. Bintangpusnas Edu, 2013.

- Imam Al Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah, 2010.
- Kennedy, Duncan. *A Critique of Adjudication: Fin de Siècle*. Harvard University Press, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia group. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Pring, George William, dan Penelope Canan. "SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out." In *Choice Reviews Online*, 34:34-1218-34-1218. America, 1996.
- Rahmadani. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Diedit oleh Syahrani. Jakarta: Antasari Press, 2011.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. PT Nasya Expanding Management. Vol. 01, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat / Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji," 2010.
- Sunggono, Bambang. "Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar." Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 1997, 1-167.
- Syekh Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Usul Fikih*. Diedit oleh PTAsdi Mahasatya. PT RINEKA CIPTA. Keiima. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2019.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. RISTANSI: Riset

Akuntansi, 2019.

Zuhaili, Wahbah Al. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu.” FLIPHTML5, 2011.

JURNAL ILMIAH

Afar. “Fiqh Siyasah.” Repository UIN Imam Bonjol 5 (2018): 1–9.

Aulia, Nadya Zahra, Alya Zafira, dan Regina Margarettha. “Anti-Slapp : Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup.” Jurnal Legislatif 5, no. 1 (2021): 1–13.

Dewi Anggraini, Irma. “Pelanggaran Hak Konstitusional Mengenai Multitafsir Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Jurnal Lex Renaissance 6, no. 2 (2021): 420–33.

Dicky Andika Rauf, Ahamd, dan Moh. Rivaldi Moha. “Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 2 (2025): 601–21.

European Court of Human Right. “Case Of Delfi AS v. Estonia,” no. 64569 (2015).

Indrawati, Nani. “Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia.” Media Iuris 5, no. 1 (2022): 115–34.

Kadri, Wahijul, dan Nurul Hidayah Tumadi. “Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah.” Jurnal Hukum Tata Negara 5, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

Muhammad, Abdulkadir. “Hukum dan Penelitian Hukum” 8, no. 1 (2004): 134.

Muthalib, Abdul Salman, dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi. “Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an.” Tafse: Journal

- of Qur'anic Studies 4, no. 2 (2019): 150–66.
- Nautz, Jürgen. “International Covenant on Civil and Political Rights.” *Slavery in the Modern World: A History of Political, Social, and Economic Oppression: Volume 1-2* 1, no. 1933 (1966): 339–40.
- Nicolas Gimon, Daniel. “Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi.” *Lex Administratum* VI, no. 4 (2018): 173–80.
- Osgar S. Matompo. “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat.” *Jurnal Media Hukum* 21, no. Hak Asasi Manusia (2014): 1–16.
- Riyadi, Eko, dan Sahid Hadi. “Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP): A Legal-Based Threat to Freedom of Expression.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021): 141–62.
- Simandjuntak, Jody Nicholas, Arauna Bianca Gomulia, Falindevrie Yusuf, Riyadi, Gladys Jennifer Nadila Zebua, dan Yolanda Amorita Virginia Hartawan. “Dilema dan Perkembangan Anti-SLAP di Indonesia: Implikasi PERMA 1/2023 dan Komparasi dengan Negara Lain.” *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 7, no. 2 (2022): 63–71.
- Wongkar, Etheldreda E L T, Julio Castor Achmadi, dan Theresia Iswarini. “Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (2021): 35–72.
- Skripsi/Tesis/Disertasi & Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan (Theses/Unpublished

Works)

Aqil, Ibnu. “Siyasah Syar’iyyah Siyasah Syar’iyyah.” Digilib UINSA, n.d., 22–44.

Hanifah, Inne Nur. “Implementasi Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) dalam Pertimbangan Hakim untuk Kasus Lingkungan di Karimunjawa Perspektif Keadilan Ekologis.” Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2025.

Prabowo, Galih. “BAB III SKRIPSI-dikonversi.” Universitas Ngudi Waluyo, 2023, 20–25.

Rahmawati, Fitri. “Kebijakan Anti Eco-SLAPP dalam Melindungi Aktivis Lingkungan di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025.

Sugiono. “Metode Penelitian Metode Penelitian.” Metode Penelitian Kualitatif, no. 17 (2015): 43.

SUMBER DARING DAN ARTIKEL BERITA

Amnesty Internasional. “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.” Beberapa Aspek Terkait Hak Aspek Manusia. Amnesty Internasional, 2023.

Ardika, Komang. “Tonggak Sejarah: Putusan Pidana Anti-SLAPP Pertama di Indonesia.” Diedit oleh Tim MariNews. MariNews, 2025.

Christiawan, Rio. “Penulisan Studi Kasus Hukum Dalam Penelitian Normative.” Scribd, 2023.

Fachri, Ferinda K. “Membedah Hukum dalam Buku dengan Hukum dalam Praktik.” Hukumonline.com, 2024.

Felicia Salvina. “Setelah menjalani proses panjang selama dua tahun, kasus Septia

- Dwi Pertiwi, mantan karyawan Jhon LBF, akhirnya selesai!” *kompas.com*, 2025.
- ICEL. “Mengenal Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dan Karakteristiknya,” 2021.
- Indrayana, Denny. “Tinjauan Hukum atas Pengaturan Mengenai Pembatasan Tindakan Keperdataan dalam Pengurusan Piutang Negara di Sektor Jasa Keuangan,” 2022, 1–67.
- KontraS. “Siaran Pers Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan Mahkamah Konstitusi: Batalkan Pasal-Pasal Bermasalah, Selamatkan Demokrasi dan Negara Hukum.” *Kontras.Org*. KontraS, 2025.
- Lembaga Bantuan Hukum. “Buruh Perempuan yang Membela Diri Tidak Boleh Dikriminalisasi,” 2024, 1–9.
- Trikarinaputri, Ervana. “Kritik Upah Lembur Tak Dibayar Berujung Pidana, Eks Karyawan Jhon LBF: Saya Tidak Menyesal.” *TEMPO*, 2024.